



# LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG TAHUN 2022

BAPPEDALITBANG KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2023

## DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	1
B. SUSUNAN ORGANISASI.....	3
C. ASPEK STRATEGIS.....	4

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

A. RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2018-2023.....	5
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	8

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	12
B. REALISASI ANGGARAN.....	36

### **BAB IV PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	38
B. REKOMENDASI .....	38

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Kinerja Renstra Perubahan 2018-2023.....	8
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2022.....	10
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2022.....	10
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Utama Tahun 2022.....	12
Tabel 3.2	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	13
Tabel 3.3	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Tujuan 1.....	14
Tabel 3.4	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020-2022 Tujuan 1.....	15
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Tujuan 1.....	16
Tabel 3.6	Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Tujuan 1.....	17
Tabel 3.7	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 .....	19
Tabel 3.8	Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Perjanjian Kinerja Tujuan 1 .....	20
Tabel 3.9	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Tujuan 2.....	22
Tabel 3.10	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020-2022 Tujuan 2.....	23
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Tujuan 2.....	24
Tabel 3.12	Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Tujuan 2 .....	25
Tabel 3.13	Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Perjanjian Kinerja Tujuan 2 .....	26
Tabel 3.14	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Tujuan 3.....	27
Tabel 3.15	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020-2022 Tujuan 3.....	29
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Tujuan 3.....	30
Tabel 3.17	Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Tujuan 3 .....	30
Tabel 3.18	Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banyumas Tahun 2022.....	31
Tabel 3.19	Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Perjanjian Kinerja Tujuan 3 .....	32
Tabel 3.20	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Indikator Hasil Rekomendasi .....	33

Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Akhir 2023.....	35
Tabel 3.22	Realisasi Anggaran Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2022.....	36
Tabel 3.23	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Keselarasan Renstra Perubahan dengan RPJMD Perubahan.....	7
--	---

## BAB I PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti diamanatkan UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan perubahan paradigma manajemen pemerintahan birokrasi yang berorientasi kepada efisiensi dan efektivitas. Penyelenggaraan birokrasi Pemerintah perlu diarahkan untuk mewujudkan *good governance*.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu adanya kebijakan dalam menyelenggarakan urusan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing fungsi. Kebijakan tersebut kemudian akan didukung dengan program dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan di tingkat pusat. Keselarasan tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi teknis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah kemudian dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan serta memperhatikan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

### A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Amanat peran Bappedalitbang Kabupaten Banyumas tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.

### 1. Kedudukan

Bappedalitbang merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan Daerah. Bappedalitbang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### 2. Tugas

Bappedalitbang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bappedalitbang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang penelitian dan pengembangan;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bappedalitbang; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

## **B. SUSUNAN ORGANISASI**

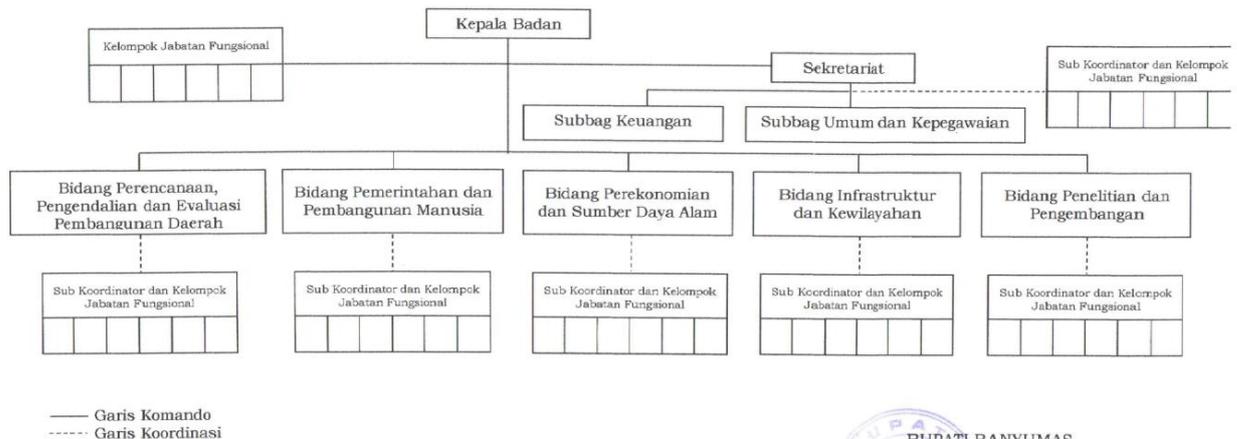
Susunan organisasi Bappedalitbang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Koordinator Perencanaan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari :
  - a. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan;
  - b. Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Pemerintahan;
  - b. Sub Koordinator Pembangunan Manusia;
  - c. Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat.
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Perekonomian;
  - b. Sub Koordinator Sumber Daya Alam.
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Infrastruktur Wilayah;
  - b. Sub Koordinator Permukiman Wilayah;
  - c. Sub Koordinator Pengembangan Wilayah.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
  - b. Sub Koordinator Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
8. Jabatan Fungsional

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 91 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN,  
 PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,  
  
 ACHMAD HUSEIN

### C. ASPEK STRATEGIS

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yaitu:

1. Menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan daerah;
2. Mensinergikan perencanaan di tingkat daerah, provinsi dan pusat dalam mencapai target pembangunan;
3. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana pembangunan, dan hasil rencana pembangunan;
4. Menjaga keberlangsungan sistem penelitian dan pengembangan, inovasi dan kreativitas daerah.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Ditetapkannya RPJMN Tahun 2020–2024 dan perubahan beberapa kebijakan perencanaan pembangunan nasional menyebabkan penyesuaian perencanaan pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Di sisi lain, kejadian luar biasa pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi makro ekonomi nasional dan daerah sehingga perencanaan pembangunan harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perubahan RPJMD juga harus diikuti oleh Perangkat Daerah untuk melakukan penyesuaian perencanaan pembangunan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan tersebut dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2018-2023.

Dalam perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Banyumas yang meliputi beberapa runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah, telaah terhadap dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah penentuan Isu-Isu Strategis

Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

Visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

***“Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur Dan Mandiri”***

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

**a. Maju**

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya.

**b. Adil-Makmur**

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah).

**c. Mandiri**

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 menjabarkan kedalam 8 (delapan) Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu :

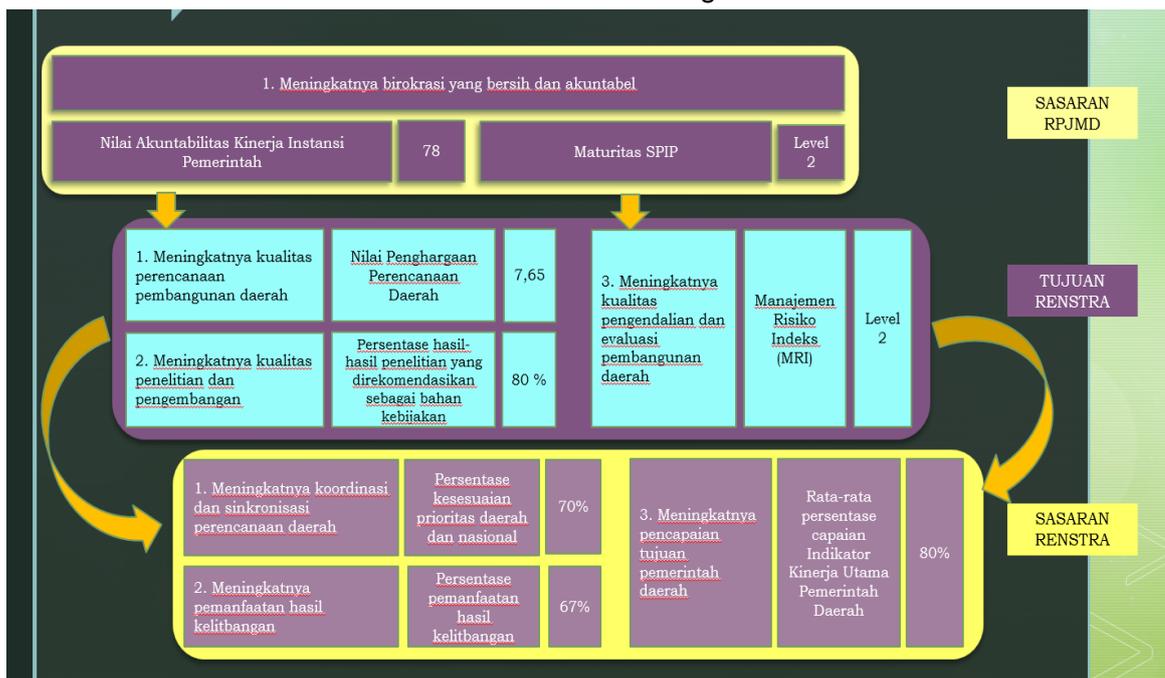
1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya local;
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas yaitu misi 1 (satu), mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang professional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermataabab melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Keselarasan Renstra Perubahan dengan RPJMD Perubahan dalam mendukung misi yang diampu oleh Bappedalitbang dapat ditunjukkan dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1

Keselarasan Renstra Perubahan dengan RPJMD Perubahan



Target kinerja Bappedalitbang yang tertuang dalam Renstra Perubahan 2018-2023 dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Target Kinerja Renstra Perubahan 2018-2023

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target				Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	s/d 2023	
<b>Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Nilai Penghargaan Pembangunan Daerah</b>		7,57	7,6	7,65	7,7	7,7	
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah	Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional	%	Na	60	70	80	80	
<b>Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah</b>	<b>Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan</b>	%	Na	75	80	85	85	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	62	65	67	70	70	
<b>Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</b>	<b>Manajemen Risiko Indeks (MRI)</b>	Level	Na	2	2	3	3	
Meningkatnya pencapaian tujuan pemerintah daerah	Rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	%	Na	70	80	90	90	

## B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang kepada Bupati Banyumas sebagai pemberi mandat dan kepada publik yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kendala Bappedalitbang dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pelaksana. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 yang didasari oleh Rencana Strategis Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Bayumas Tahun 2018–2023.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas selengkapnya disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022
1	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Nilai Penghargaan Pembangunan Daerah</b>	<b>7.65</b>
	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah	Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional	70%
2	<b>Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah</b>	<b>Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan</b>	<b>80%</b>
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	67%
3	<b>Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Manajemen Risiko Indeks (MRI)</b>	<b>Level 2</b>
	Meningkatnya pencapaian tujuan pemerintah daerah	Rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	80%

Perjanjian Kinerja yang telah disusun pada awal tahun tersebut kemudian mengalami perubahan dengan penambahan indikator kinerja sesuai dengan hasil rekomendasi Kemenpan RB pada saat melakukan penilaian. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Perubahan Bappedalitbang Tahun 2022:

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai Penghargaan Pembangunan Daerah	7.65
2	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah	Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional	70%
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan	80%

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2022
4	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	67%
5	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Level 2
6	Meningkatnya pencapaian tujuan pemerintah daerah	Rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	80%
7	Tercapainya nilai SAKIP komponen perencanaan	Capaian nilai SAKIP komponen perencanaan	24.2%
8	Tercapainya program prioritas Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian program prioritas Pemerintah Daerah	53%
9	Terwujudnya Renstra OPD yang baik	Persentase Renstra OPD yang baik	94.64%

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Organisasi Perangkat Daerah mengemban amanat untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang menunjukkan realisasi dan tingkat capaian kinerja yang telah diperjanjikan

Pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas mengacu pada tujuan dan sasaran strategis Bappedalitbang Kabupaten Banyumas yang tercantum pada dokumen Renstra Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023. Pengukuran kinerja tahun 2022 pada Bappedalitbang dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya pada tahun 2022.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Capaian kinerja dan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2022 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Utama Tahun 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai Penghargaan Pembangunan Daerah	7.65	Na	Na
2	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah	Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional	70%	85.71%	122.44%
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan	80%	100%	125%

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	67%	50%	74.63%
5	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Level 2	*Level 3	150%
6	Meningkatnya pencapaian tujuan pemerintah daerah	Rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	80%	* 33.33%	41.66%
7	Tercapainya nilai SAKIP komponen perencanaan	Capaian nilai SAKIP komponen perencanaan	24.2%	*24%	99.17%
8	Tercapainya program prioritas Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian program prioritas Pemerintah Daerah	53%	70.59%	100%
9	Terwujudnya Renstra OPD yang baik	Persentase Renstra OPD yang baik	94.64%	94.64%	100%

\*Masih menggunakan angka sementara karena data belum publish

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah digunakan skala pengukuran sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	91 ≤ 100	Sangat tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat rendah

Evaluasi dan analisa capaian masing-masing kinerja utama dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja tahun 2022 untuk **tujuan 1 “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah”** dengan indikator Nilai Penghargaan Pembangunan Daerah yang didukung **sasaran “Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah”** dengan indikator persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional dijelaskan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3

## Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Tujuan 1

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Kategori
1	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Nilai Penghargaan Pembangunan Daerah</b>	7.65	Na	Na	Na
	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah	Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional	70%	85.71%	122.44%	Sangat Tinggi

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan evaluasi kreatif yang mengikuti kondisi aktual Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, memberikan motivasi sekaligus apresiasi kepada pemerintah daerah yang menghasilkan perencanaan yang berkualitas, konsisten, komprehensif, dan terukur, serta dapat dilaksanakan.

Penghargaan Pembangunan Daerah diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dengan ruang lingkup penilaian meliputi: (1) Proses penyusunan dokumen RKPD, (2) Kualitas dokumen perencanaan daerah (RKPD), (3) Pencapaian pembangunan daerah, dan (4) Inovasi pembangunan yang dikembangkan.

Teknis Penilaian Penghargaan Kabupaten dinilai oleh Tim Penilai Provinsi. Pada tahun 2022 capaian tujuan dengan indikator Nilai PPD tidak dapat dikategorikan karena Kabupaten Banyumas tidak termasuk dalam

peringkat sepuluh besar di Tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam penilaian tersebut, sedangkan Provinsi Jawa Tengah hanya mengeluarkan nilai bagi peringkat sepuluh besar Kabupaten/Kota dengan nilai terbaik. Sasaran dengan indikator persentase kesesuaian prioritas daerah dan prioritas nasional tercapai dengan kategori sangat tinggi. Dari tujuh (7) prioritas nasional terdapat satu prioritas yang tidak masuk dalam prioritas daerah karena bukan kewenangan daerah.

Perbandingan capaian kinerja Bappedalitbang untuk **tujuan “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah”** yang didukung **sasaran “Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah”** tahun 2022 dengan beberapa tahun sebelumnya dijabarkan dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020-2022 Tujuan 1

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai Penghargaan Pembangunan Daerah	Na (Belum menjadi indikator)	7.57	Na	7.6	7.6	100 %	7.65	Na	Na
	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah	Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional	Na (Belum menjadi indikator)	Na (Belum menjadi indikator)	Na (Belum menjadi indikator)	60%	81.82 %	136.37 %	70%	85.71 %	122.44 %

Pada tahun 2020 Kabupaten Banyumas mendapat Nilai PPD 7,57 dan mengalami kenaikan 0,03 pada tahun 2021. Nilai tersebut membawa Kabupaten Banyumas masuk pada peringkat sepuluh besar Kabupaten/Kota dengan nilai terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2022 Nilai PPD Kabupaten Banyumas tidak dipublish karena

Provinsi Jawa Tengah hanya mengeluarkan Nilai PPD untuk peringkat sepuluh besar Kabupaten/Kota terbaik di Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran dengan indikator persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional ditahun 2021 dengan 2022 secara capaian menurun sebesar 13,97%. Hal tersebut disebabkan target setiap tahunnya meningkat, pada tahun 2021 realisasi kinerja pada indikator tersebut melebihi target sebesar 21,82% sedangkan pada tahun 2022 realisasi kinerja hanya melebihi target sebesar 15,71%. Namun jika dilihat pada angka realisasi mengalami peningkatan sebesar 3,89% dari tahun 2021.

Realisasi Kinerja untuk **tujuan “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah”** jika dibandingkan dengan target akhir renstra belum tercapai, sedangkan untuk **sasaran “Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah”** sudah melampaui target akhir renstra sebesar 80% dengan realisasi pada tahun 2022 yaitu 85,71%. Perbandingan target tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Tujuan 1

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra	Capaian	Tingkat Kemajuan
1	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Nilai Penghargaan Pembangunan Daerah</b>	Na	7.7	Na	Belum Tercapai
	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah	Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional	85.71 %	80%	107.14 %	Tercapai

Pada akhir tahun 2023 Kabupaten Banyumas menargetkan untuk mendapat PPD dengan nilai 7.7, sedangkan pada tahun 2022 ini Kabupaten Banyumas belum masuk ke dalam peringkat sepuluh besar terbaik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sehingga nilai PPD pada tahun ini tidak diketahui. Realisasi Nilai PPD pada tahun 2021 sudah mendapatkan nilai 7,6 dan perlu meningkatkan nilai sebesar 0,1 untuk mencapai target akhir 2023. Peningkatan nilai ini harus dilakukan dengan upaya yang cukup keras dari seluruh *stakeholder* Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

Tabel 3.6

Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi Tujuan 1

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Peningkatan/ Penurunan Kinerja	Alternatif Solusi
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai Penghargaan Pembangunan Daerah	7.65	Na	Na	Belum optimalnya kualitas rencana pembangunan daerah	Aspek kualitas dokumen perencanaan perlu disesuaikan dengan aspek penilaian PPD
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah	Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional	70%	85.71 %	122.44 %	Bappeda Kab. Banyumas melakukan telaah/penyesuaian dengan perencanaan Provinsi dan Nasional	Dengan terus melakukan peningkatan kualitas analisis penyesuaian prioritas daerah dengan nasional

Adanya penurunan nilai PPD dari tahun sebelumnya dikarenakan belum optimalnya kualitas rencana pembangunan daerah. Aspek kualitas dokumen perencanaan masih perlu disesuaikan dengan aspek penilaian penghargaan pembangunan daerah, dimana aspek inovasi masih perlu peningkatan dan menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan.

Salah satu strategi peningkatan kualitas perencanaan yang sudah dilakukan yaitu dengan mereview kembali pohon kinerja (*logical frame work*) dengan mendasarkan pada isu strategis (*outcome*) yang diurai kedalam isu-isu antara (*outcome* antara), dan melengkapinya dengan indikator kinerja, serta

membuat hubungan logika sebab akibat diantaranya, dengan mengesampingkan terlebih dahulu komponen perencanaan, hirarki organisasi, SOTK, nomenklatur program, kegiatan dan anggaran. Selanjutnya pohon kinerja digunakan sebagai dasar untuk mereview kembali rumusan tujuan, sasaran serta indikator kinerja yg akan diterjemahkan kedalam perencanaan jangka menengah.

Dengan dilakukannya review pohon kinerja diharapkan kualitas perencanaan dapat ditingkatkan, selain itu dilakukan pengendalian dan evaluasi agar capaian pembangunan daerah tercapai (pelaksanaan pembangunan sesuai target), serta dilakukan review dokumen perencanaan secara menyeluruh agar dokumen perencanaan pembangunan berkualitas (sinkronisasi, integrasi, kelengkapan data dan kedalaman analisis) dengan pemanfaatan kelitbangan dalam kebijakan pembangunan.

Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional merupakan indikator yang mengukur tingkat kesesuaian antara prioritas daerah dengan nasional. Prioritas Nasional pada tahun 2022 mengusung tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” dengan tujuh (7) prioritas. Sedangkan Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 mengusung tema “Peningkatan Ekonomi dengan Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM” dengan lima (5) prioritas pembangunan.

Dari tujuh prioritas pembangunan Nasional, sebanyak enam prioritas telah selaras dengan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Banyumas. Satu prioritas nasional bukan merupakan kewenangan daerah yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Keselarasan antara prioritas Nasional dan prioritas Kabupaten Banyumas dijabarkan dalam tabel 3.7.

Tabel 3.7  
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas dengan Prioritas  
Pembangunan Nasional Tahun 2022

No	Prioritas Nasional	No	Prioritas Kabupaten Banyumas
3	Pembangunan Ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan		Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia
4	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	2	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	5	Pengembangan smart Government dalam peningkatan kualitas pelayanan publik
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	1	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan ketahanan bencana
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	4	Peningkatan kualitas Infrastruktur untuk memperkuat daya saing daerah

Upaya yang dilakukan untuk memperoleh capaian tersebut dengan melakukan Perubahan pada RPJMD dan dilakukan review atas keselarasan antara prioritas nasional dan provinsi dengan prioritas Kabupaten Banyumas. Capaian yang sudah melampaui target tetap perlu dipertahankan dengan didukung oleh program-program daerah yang mendukung prioritas nasional.

Program dan kegiatan yang menunjang **tujuan “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah”** dan **sasaran “Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah”** dijabarkan dalam tabel 3.8

Tabel 3.8  
Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Perjanjian Kinerja Tujuan 1

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
1	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Nilai Penghargaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Na</b>					
	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah	Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional	122.44	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	100	Menunjang
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	100	Menunjang
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterisian data profil daerah	108.91	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun	100	Menunjang
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun	100	Menunjang

					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang disusun	100	Menunjang
--	--	--	--	--	---	---	-----	-----------

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Keberhasilan sasaran “Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah” didukung dari dilaksanakannya program-program berikut:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan beberapa kegiatan yaitu :
  - 1.) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 2.) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan beberapa kegiatan yaitu :
  - 1.) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
  - 2.) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
  - 3.) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).

Capaian program dan kegiatan yang menunjang tujuan **Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah** pada tahun 2022 sudah mencapai 100% dan pada kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah capaian lebih dari 100%. Hal tersebut dikarenakan target pada indikator persentase keterisian data profil daerah pada tahun 2022 yaitu 82% dan realisasinya adalah 89,31%.

2. Capaian kinerja tahun 2022 untuk **tujuan “Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah”** dengan indikator persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan yang didukung **sasaran “Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan”** dengan indikator persentase pemanfaatan hasil kelitbangan menunjukkan capaian dengan kategori sangat tinggi.

Tabel 3.9  
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Tujuan 2

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Kategori
1	<b>Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah</b>	<b>Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan</b>	80%	100%	125%	<b>Sangat Tinggi</b>
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan menunjukkan capaian	67%	50%	74.63%	Sedang

Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan merupakan indikator yang membandingkan antara jumlah hasil penelitian yang direkomendasi sebagai bahan kebijakan dengan jumlah penelitian yang dilaksanakan pada tahun berkenaan. Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 22 kajian yaitu:

- a. Kajian bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan sebanyak 10 kajian, terdiri dari 8 kajian pemerintahan umum, 1 kajian aparatur dan reformasi birokrasi serta 1 kajian keuangan dan asset daerah reformasi birokrasi.
- b. Kajian bidang sosial dan kependudukan sebanyak 5 kajian terdiri dari 4 kajian pariwisata yang dilaksanakan pada 2021 dan 2022, serta 1 kajian kesehatan.
- c. Kajian bidang ekonomi dan pembangunan sebanyak 7 kajian yang terdiri dari 1 kajian perindustrian dan perdagangan, 2 kajian

pertanian, perkebunan dan pangan, 1 kajian kelautan dan perikanan, 1 kajian lingkungan hidup dan 1 kajian perhubungan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penelitian serta telah merekomendasikan semua hasil penelitian di tahun 2022 sebagai bahan kebijakan sehingga realisasi indikator tersebut pada tahun 2022 sebesar 100% dan melebihi target dengan capaian 125%.

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan merupakan indikator yang membandingkan jumlah kelitbangan yang dimanfaatkan dengan total kelitbangan yang ada. Hasil kelitbangan merupakan hasil dari pelaksanaan lomba Krenova. Pada tahun 2022 lomba Krenova dilaksanakan dengan 2 kategori yaitu kategori aplikasi dan kategori teknologi tepat guna. Dari enam hasil tersebut terdapat tiga hasil kelitbangan yang telah dimanfaatkan. Sehingga realisasi pada 2022 hanya 50% dengan capaian hanya 74,63% dikarenakan realisasi masih dibawah target 2022 yaitu 67%.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 Bappedalitbang untuk **tujuan “Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah”** yang didukung **sasaran “Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan”** dengan beberapa tahun sebelumnya dijabarkan dalam tabel 3.10.

Tabel 3.10

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020-2022 Tujuan 2

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan	NA (Belum menjadi indikator)	NA	NA	75 %	100 %	133.33 %	80 %	100%	125%
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	62%	66.67 %	107.53 %	65 %	66.67 %	102.57 %	67 %	50%	74.63%

Pada indikator persentase hasil hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan pada tahun 2020 indikator tersebut belum menjadi indikator, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 konsisten sebesar 100% dikarenakan seluruh hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan selalu direkomendasikan sebagai bahan kebijakan. Selanjutnya untuk indikator sasaran yaitu Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun 2020 dan 2021 konsisten sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 16,67% dari tahun 2021. Hal tersebut disebabkan karena pemenang lomba krenova yang telah dimanfaatkan menurun dari tahun sebelumnya menjadi 3, sedangkan pada tahun sebelumnya terdapat 4 inovasi yang telah dimanfaatkan.

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Renstra Tujuan 2

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra	Capaian	Tingkat Kemajuan
2	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan	100%	85%	117.65 %	Tercapai
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	50 %	70%	46.67%	Belum Tercapai

Realisasi indikator persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan telah memenuhi target pada target akhir Renstra. Walaupun demikian angka ini harus dipertahankan sampai dengan akhir tahun Renstra supaya target akhir dapat tercapai. Sedangkan realisasi indikator persentase pemanfaatan hasil kelitbangan belum mencapai target 2022 yaitu 67%, dan masih memerlukan usaha yang cukup keras untuk mencapai target akhir tahun Renstra yaitu 70%. Dalam upaya mencapai

tujuan dan sasaran ini didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Tabel 3.12  
Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi 2

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Peningkatan/ Penurunan Kinerja	Alternatif Solusi
<b>Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah</b>	<b>Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	125%	Seluruh hasil-hasil penelitian yang dilakukan direkomendasikan sebagai bahan kebijakan	Peningkatan kualitas dan penjaminan mutu hasil penelitian
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	67%	50%	74.63%	Inovasi yang dimanfaatkan hanya dari pemenang lomba krenova yang sebelumnya sudah dimanfaatkan	Dengan melakukan pendampingan dan fasilitasi inovasi lain tidak hanya dari krenova agar dapat dimanfaatkan

Berdasarkan tabel 3.12 hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan sudah seluruhnya direkomendasikan sebagai bahan kebijakan. Namun peningkatan kualitas masih perlu dilakukan agar kajian-kajian yang dilakukan dapat menjadi bahan kebijakan. Peningkatan kualitas penelitian tentunya tidak terlepas dari sumber daya peneliti yang melakukan penelitian tersebut sehingga diperlukan peningkatan kuantitas peneliti yang saat ini di Kabupaten Banyumas hanya ada dua fungsional peneliti dengan jabatan ahli muda. Selain peningkatan kuantitas, peningkatan kualitas SDM peneliti juga diperlukan dengan fasilitasi atau bimbingan teknis. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Bidang penelitian dan pengembangan juga bekerja sama dengan akademisi serta peneliti Lembaga perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Banyumas.

Pemanfaatan hasil kelitbangan diperoleh dari hasil pemenang lomba krenova yang diadakan setiap tahunnya. Terdapat dua kategori pada lomba krenova yaitu kategori aplikasi dan kategori tepat guna. Dari 6 pemenang lomba krenova, inovasi yang sudah dimanfaatkan yaitu Inovasi DEWA, KOLABIZ dan CAHAYA BULAN.

Dalam upaya mencapai keberhasilan sasaran “Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan” didukung oleh program penelitian dan pengembangan dengan dilaksanakannya beberapa kegiatan yang dijelaskan pada tabel 3.13 yaitu:

- a. Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
- b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
- d. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Tabel 3.13  
Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Perjanjian Kinerja pada Tujuan 2

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan	125%					
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	74.63 %	Penelitian dan Pengembangan		Persentase implementasi kelitbangan	100%	Menunjang
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen inovasi daerah yang disusun	100%	Menunjang
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian	100%	Menunjang

					peraturan yang disusun			
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen bidang sosial dan kependudukan yang disusun	100%	Menunjang
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	100%	Menunjang

Capaian program dan kegiatan yang menunjang tujuan **Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah** pada tahun 2022 sudah mencapai 100%. Kegiatan Penelitian sebanyak 22 kajian yang sesuai target pada tahun 2022 semua terlaksana dan direkomendasikan menjadi bahan kebijakan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Untuk kegiatan pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan indikator jumlah dokumen inovasi yang disusun pada tahun 2022 adalah dokumen inovasi pada RKPD 2022.

3. Capaian kinerja tahun 2022 untuk **tujuan “Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah”** dengan indikator Manajemen Risiko Indeks (MRI) yang didukung **sasaran “Meningkatnya pencapaian tujuan pemerintah daerah”** dengan indikator rata-rata persentase capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah menunjukkan capaian dengan kategori sangat tinggi.

Tabel 3.14  
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Tujuan 3

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Kategori
1	<b>Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</b>	<b>Manajemen Risiko Indeks (MRI)</b>	<b>Level 2</b>	<b>*Level 3</b>	<b>150%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

	Meningkatnya pencapaian tujuan pemerintah daerah	Rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	80%	* 33.33%	41.66%	Sangat Rendah
--	--	--	-----	----------	--------	---------------

\*Masih menggunakan angka sementara karena data belum publish

Manajemen Risiko Indeks (MRI) merupakan indikator yang mengukur kualitas penerapan manajemen risiko. Pentingnya penerapan manajemen risiko oleh Instansi Pemerintah dipertegas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 menetapkan “Persentase Instansi Pemerintah (K/L/D) dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) Level 3 sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas “Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi”.

Rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah merupakan indikator yang membandingkan jumlah IKU pemerintah daerah yang tercapai 100% atau lebih dengan jumlah total IKU pemerintah daerah. Pada tahun 2022 terdapat 4 IKU Pemda dengan capaian 100% atau lebih dari total 12 IKU pemda yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi daerah, Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD dan Angka Kriminalitas. Sedangkan untuk IKU dengan capaian lebih dari 90% yaitu Persentase penduduk miskin, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persentase Kinerja Infrastruktur. Sampai dengan data ini diambil masih terdapat beberapa data capaian IKU yang belum dipublish oleh BPS yang beberapa data diantara merupakan indikator makro yaitu Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita. Indek Reformasi Birokrasi data didapatkan dari Kemenpan-RB dan Indeks Ketahanan Pangan dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 Bappedalitbang untuk **tujuan “Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah”** yang didukung **sasaran “Meningkatnya pencapaian tujuan**

pemerintah daerah” dengan beberapa tahun sebelumnya dijabarkan dalam tabel 3.15.

Tabel 3.15

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020-2022 Tujuan 3

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	NA (Belum menjadi indikator)	NA (Belum menjadi indikator)	NA (Belum menjadi indikator)	Level 2	Level 3	150%	Level 2	*Level 3	150%
	Meningkatnya pencapaian tujuan pemerintah daerah	Rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	NA (Belum menjadi indikator)	NA (Belum menjadi indikator)	NA (Belum menjadi indikator)	70%	50%	71.43 %	80%	*33.33%	41.66 %

\*Masih menggunakan angka sementara karena data belum publish

Nilai MRI Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 belum menjadi indikator kinerja. Pada tahun 2021 dan 2022 Kabupaten Banyumas tetap berada di level 3 dengan nilai MRI yang dikeluarkan oleh BPKB pada tahun 2021 adalah 3,013 dan pada tahun 2022 nilai dari BPKP belum dikeluarkan, nilai menggunakan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dengan nilai MRI pada tahun 2022 adalah 3,52. Berdasarkan hal tersebut meskipun tetap berada pada level yang sama namun nilainya mengalami peningkatan.

Pada tahun 2021 capaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dari 12 indikator terdapat 6 indikator yang mencapai target 100% atau lebih, sedangkan pada tahun 2022 hal tersebut mengalami penurunan. Sampai dengan data ini diabil IKU Pemda Kabupaten Banyumas yang capaiannya sudah tercapai 100% atau lebih hanya terdapat 4 IKU dan masih ada beberapa data IKU yang belum dipublish oleh instansi yang menerbitkan indikator makro yang menjadi IKU Kabupaten Banyumas.

Tabel 3.16

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Renstra Tujuan 3

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra	Capaian	Tingkat Kemajuan
3	<b>Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</b>	<b>Manajemen Risiko Indeks (MRI)</b>	*Level 3	Level 3	100%	Tercapai
	Meningkatnya pencapaian tujuan pemerintah daerah	Rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	*33.33 %	90%	64.81%	Belum Tercapai

\*Masih menggunakan angka sementara karena data belum publish

Realisasi indikator MRI telah memenuhi target pada tahun 2022 dan target akhir Renstra. Angka ini harus dipertahankan sampai dengan akhir tahun Renstra supaya target akhir dapat tercapai. Sedangkan realisasi indikator rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah pada tahun 2022 yaitu sebesar 33.33%. Realisasi indikator ini menurun dari tahun 2021 dan belum mencapai target di tahun 2022 dan masih memerlukan usaha untuk mencapai target akhir tahun Renstra yaitu 90%. Diperlukan usaha yang cukup dari seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Banyumas agar target IKU dapat tercapai semua.

Tabel 3.17

Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi Tujuan 3

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Peningkatan/ Penurunan Kinerja	Alternatif Solusi
<b>Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Manajemen Risiko Indeks (MRI)</b>	Level 2	*Level 3	150%	Reviu dan evaluasi atas kualitas identifikasi dan analisis resiko belum optimal	Mengoptimalkan Unit Pemilik Resiko untuk memastikan bahwa pengelolaan resiko telah dilakukan

						secara memadai dan dilakukan review berkala
Meningkatnya pencapaian tujuan pemerintah daerah	Rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	80%	*33.33 %	41.66%	Dari 12 IKU Pemda hanya 4 IKU yang capaiannya sudah 100% atau lebih	Melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi atas capaian IKU Pemda

\*Masih menggunakan angka sementara karena data belum publish

Penilaian risiko oleh Penjamin Kualitas Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 memberikan hasil penjaminan pada 10 OPD sampel menunjukkan bahwa penilaian risiko telah dilakukan dengan cukup baik pada level strategi OPD dan level Operasional OPD. Namun demikian, pengambilan keputusan belum sepenuhnya mempertimbangkan hasil identifikasi dan analisis risiko. Reviu dan evaluasi atas kualitas identifikasi dan analisis risiko belum dilakukan secara optimal dan belum seluruh perangkat daerah melakukan reviu atas risiko dan belum sepenuhnya dievaluasi secara berkala maupun implementasi rencana tindak pengendaliannya.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas terdapat 12 indikator dan capaian pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.18.

Tabel 3.18  
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Kinerja RKPD Tahun 2022		Prosentase Kinerja RKPD s.d. 2022	Status Capaian 2022
		2021	Target 2022 (sesuai RPJMD)	Capaian 2022 s.d. Triwulan IV		
Indek Reformasi Birokrasi		71.12	73.00	N/A	N/A	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		72.44	72.38	73.17	101.09	
Persentase penduduk miskin	%	13.66	11.76	12.84	90.82	

Pertumbuhan Ekonomi	%	4	4.5	N/A	N/A	
PDRB per Kapita	juta rupiah	31.81	33.725	N/A	N/A	
Indeks Ketahanan Pangan		79.97	74.03	N/A	N/A	
Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah	%	1.35	2	6.28	314	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6.05	5.00	6.05	79	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		72.83	64.06	63.81	99.61	
Persentase Kinerja Infrastruktur	%	53.47	69.33	64.33	92.79	
Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	5.2	5	6.38	127.6	
Angka Kriminalitas	per 10.000 penduduk	1.22	1.586	1.26	120.55	

Tabel 3.19  
Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Perjanjian Kinerja Tujuan 3

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
3	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	150 %					
	Meningkatnya pencapaian tujuan pemerintah daerah	Rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	*41.66 %	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Rata-rata persentase capaian indikator kinerja Program	93.2 %	Menunjang
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RKPD yang dijabarkan secara konsisten ke dalam APBD	100 %	Menunjang

Keberhasilan sasaran “Meningkatnya pencapaian tujuan pemerintah daerah” didukung oleh program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan indikator rata-rata persentase capaian indikator program serta melaksanakan kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian rata rata persentase capaian indikator program sebesar 93,2%. Angka tersebut didapat dari jumlah program yang sudah memenuhi target 100% atau lebih dibagi seluruh program yang ada di Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2022 dari 515 program yang dilaksanakan, sebanyak 480 program sudah tercapai target 100% atau lebih.

4. Capaian kinerja tahun 2022 untuk kinerja hasil rekomendasi Kemenpan RB dalam penilaian SAKIP tahun 2022 menunjukkan capaian dengan kategori sangat tinggi.

Tabel 3.20  
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Indikator Hasil Rekomendasi

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Kategori
1	Tercapainya nilai SAKIP komponen perencanaan	Capaian nilai SAKIP komponen perencanaan	24.2%	*24%	99,17%	Sangat Tinggi
2	Tercapainya program prioritas pemerintah daerah	Persentase ketercapaian program prioritas pemerintah daerah	53%	70,59%	133,19%	Sangat Tinggi
3	Terwujudnya Renstra OPD yang baik	Persentase Renstra OPD yang baik	94.64%	94.64%	100%	Sangat Tinggi

\*Masih menggunakan angka tahun lalu karena data belum publish

Capaian nilai SAKIP komponen perencanaan merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan selain indikator penilaian PPD. Nilai SAKIP diperoleh dari hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB.

Persentase ketercapaian program prioritas pemerintah daerah merupakan indikator yang membandingkan program prioritas yang telah tercapai 100%

atau lebih dengan jumlah program prioritas pemerintah daerah. Tahun 2022 ditargetkan 9 program prioritas dapat tercapai dari total 17 program prioritas. Dari 9 target tersebut dapat direalisasikan sebanyak 12 program yaitu:

1. Program Pelayanan Penanaman Modal Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
2. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan :Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar.
3. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan :Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama.
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sub Kegiatan :Pembangunan Puskesmas
5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sub Kegiatan :Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
6. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
7. Program Pengembangan Ekspor
8. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
9. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
10. Program Penyelenggaraan Jalan
11. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
12. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Persentase Renstra OPD yang baik merupakan indikator yang membandingkan hasil evaluasi SAKIP pada komponen perencanaan yang menunjukkan hasil baik berdasar LHE Inspektorat dibandingkan dengan total OPD. Pada tahun 2022 terdapat 3 OPD dengan nilai kurang dari 80 pada komponen perencanaannya.

Tabel 3.21

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Akhir 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir 2023	Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Tercapainya nilai SAKIP komponen perencanaan	Capaian nilai SAKIP komponen perencanaan	*24%	24.5%	97.96%	Belum Tercapai
2	Tercapainya program prioritas pemerintah daerah	Persentase ketercapaian program prioritas pemerintah daerah	70,59%	100%	70,59%	Belum Tercapai
3	Terwujudnya Renstra OPD yang baik	Persentase Renstra OPD yang baik	94.64%	100%	94.64%	Belum Tercapai

Realisasi masing-masing indikator belum memenuhi target pada tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir tahun 2023. Oleh karena itu diperlukan usaha yang cukup dari seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Banyumas agar target akhir dapat tercapai.

## B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Bappedalitbang tahun 2022 sebesar Rp 12.420.909.318,- dengan realisasi anggaran Rp 11.492.678.348,- atau sebesar 92.52% yang ditunjukkan dengan tabel 3.22. Dari tabel tersebut dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian indikator kinerja pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas tahun 2022.

Tabel 3.22

Realisasi Anggaran Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	
			Rp	Rp	%
1	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah</b>  Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah	<b>Nilai Penghargaan Pembangunan Daerah</b>  Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional	<b>10.875.909.318</b>	<b>10.087.951.948</b>	<b>92.75</b>
			10.875.909.318	10.087.951.948	92.75
2	<b>Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan</b>  Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	<b>Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan</b>  Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	<b>1.415.000.000</b>	<b>1.294.924.400</b>	<b>91.51</b>
			1.415.000.000	1.294.924.400	91.51
3	<b>Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</b>  Meningkatnya pencapaian tujuan pemerintah daerah	<b>Manajemen Risiko Indeks (MRI)</b>  Rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	<b>130.000.000</b>	<b>109.802.000</b>	<b>84.47</b>
			130.000.000	109.802.000	84.47

Seluruh realisasi anggaran sebagaimana tercantum pada Tabel 3.22 di atas merupakan salah satu sumber daya bagi tercapainya tujuan dan

sasaran Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 2,45% yaitu dari angka 90,07% menjadi 92,52%. Sedangkan berkaitan dengan efisiensi yaitu realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran dapat disajikan dalam tabel 3.23 sebagai berikut:

Tabel 3.23  
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %	
1	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>7.65</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>10.875.909.318</b>	<b>10.087.951.948</b>	<b>92.75</b>	<b>NA</b>
	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah	70%	85.71%	122.44	10.875.909.318	10.087.951.948	92.75	29.69%
2	<b>Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>125</b>	<b>1.415.000.000</b>	<b>1.294.924.400</b>	<b>91.51</b>	<b>33.49%</b>
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	67%	50%	74.63	1.415.000.000	1.294.924.400	91.51	-
3	<b>Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Level 2</b>	<b>*Level 3</b>	<b>150</b>	<b>130.000.000</b>	<b>109.802.000</b>	<b>84.47</b>	<b>65.53%</b>
	Meningkatnya pencapaian tujuan pemerintah daerah	80%	* 33.33%	41.66	130.000.000	109.802.000	84.47	-
				<b>102.75%</b>			<b>92.52%</b>	<b>10.23%</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 realisasi anggaran sebesar 92.52% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 102.75%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10.23%.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022, BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 sebagai cerminan dari hasil kinerja BAPPEDALITBANG selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas tahun 2022, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja utama dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Mendasar pada uraian bab-bab sebelumnya dalam pencapaian tersebut ada pencapaian indikator kinerja yang pencapaiannya melampaui target yang telah ditentukan. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama dan komitmen seluruh personil BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas.

Namun demikian dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala-kendala. Adapun kendala-kendala yang dihadapi yakni pada tujuan “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah” dengan indikator Nilai Penghargaan Pembangunan Daerah tidak dapat terukur karena Nilai PPD hanya dikeluarkan untuk 10 besar peringkat tertinggi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sedangkan pada sasaran “Meningkatnya pencapaian tujuan pemerintah daerah” dengan indikator Rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah capaiannya masih rendah dan belum memenuhi target dikarenakan data-data yang dibutuhkan belum di *publish* sampai dengan LKjIP ini dibuat.

### B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisa di atas, diperlukan upaya dan strategi yang tepat guna mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas, kualitas, kuantitas perencana dan peneliti serta meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan;
3. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 ini disusun, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi perbaikan kinerja kelembagaan yang akan datang.

Purwokerto, 31 Januari 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Banyumas



**Ir. KRISTANTA, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650515 199303 1 012

## LAMPIRAN

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
(BAPPEDALITBANG)**

Jl. Prof.Dr.Soeharso No.45 Telp. (0281)632548 Fax.(0281) 640715  
Purwokerto 53114

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. KRISTANTA, M.Si  
Jabatan : Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas  
selanjutnya disebut Pihak Pertama  
Nama : Ir. ACHMAD HUSEIN  
Jabatan : Bupati Banyumas  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 19 Oktober 2022

Pihak Kedua  
BUPATI BANYUMAS  
  
Ir. ACHMAD HUSEIN  


Pihak Pertama  
KEPALA BAPPEDALITBANG  
KABUPATEN BANYUMAS  
  
Ir. KRISTANTA, M.Si  
NIP. 19650515 1993031 012  




**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Prof. Dr. Soeharso No.45 Purwokerto 53114

Telp. (0281) 632548 Fax.(0281) 640715

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PENJELASAN</b>	<b>TARGET 2022</b>
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai Penghargaan Pembangunan Daerah	Formulasi: Nilai Penghargaan Perencanaan Daerah Tipe perhitungan: Non kumulatif Sumber data: Laporan evaluasi RKPD	7.65
2	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah	Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional	Formulasi: Jumlah prioritas nasional dalam RPJMN dibagi jumlah prioritas nasional dalam RPJMD kali 100% Tipe perhitungan: Non kumulatif Sumber data: Laporan evaluasi RKPD	70%

3	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan	Formulasi: Jumlah hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan dibagi jumlah total hasil penelitian kali 100% Tipe perhitungan: Non kumulatif Sumber data: Laporan evaluasi RKPD	80%
4	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Formulasi: Jumlah kelitbangan yang dimanfaatkan dibagi jumlah kelitbangan yang ada kali 100% Tipe perhitungan: Non kumulatif Sumber data: Laporan evaluasi RKPD	67%
5	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Formulasi: Persentase capaian nilai MRI terhadap target nilai MRI Tipe perhitungan: Non kumulatif Sumber data: Dokumen SPIP	Level 2
6	Meningkatnya pencapaian tujuan pemerintah daerah	Rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	Formulasi: Jumlah indikator kinerja utama pemerintah daerah yang tercapai 100% dibagi jumlah indikator kinerja utama pemerintah daerah kali 100% Tipe perhitungan: Non kumulatif Sumber data: Dokumen SPIP, Laporan evaluasi RKPD	80%

7	Tercapainya nilai SAKIP komponen perencanaan	Capaian nilai SAKIP komponen perencanaan	Formulasi: Capaian nilai SAKIP komponen perencanaan Tipe perhitungan: Non kumulatif Sumber data: LHE SAKIP	24.2%
8	Tercapainya program prioritas Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian program prioritas Pemerintah Daerah	Formulasi: Jumlah indikator program prioritas pemerintah daerah yang tercapai 100% atau lebih dibagi jumlah indikator prioritas pemerintah daerah kali 100% Tipe perhitungan: Non kumulatif Sumber data: Laporan Monev, Evaluasi RKPd	53%
9	Terwujudnya Renstra OPD yang baik	Persentase Renstra OPD yang baik	Formulasi: Jumlah renstra OPD yang baik dibagi jumlah renstra OPD kali 100% Tipe perhitungan: Non kumulatif Sumber data: Perjanjian Kinerja Perubahan	94.64%

No.	Program	Anggaran Perubahan	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.040.827.459	APBD BAN-GUB
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 801.000.000	APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.164.081.859	APBD APBN
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp 1.415.000.000	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 12.420.909.318</b>	



Purwokerto, 19 Oktober 2022  
 KEPALA BAPPEDALITBANG KAB. BANYUMAS

Ir KRISTANTA, M.Si  
 NIP. 19650515 199303 1 012